

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian

##### 2.1.1 Tinjauan Tentang Modal Sosial

###### 2.1.1.1 Pengertian Modal Sosial

Putnam dalam bukunya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993:36) mendefinisikan modal sosial sebagai “*features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and co-operation for mutual benefit.*” Elemen-elemen dalam organisasi sosial ini adalah jaringan, norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk memperoleh manfaat bersama. Putnam melihat modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara individu yang terdiri dari “*networks of civic engagement*” yaitu jaringan hubungan sosial diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Ada dua asumsi dasar dari konsep modal sosial, yaitu adanya jaringan hubungan yang disertai norma-norma yang sesuai, dan adanya dukungan timbal balik untuk mencapai keberhasilan ekonomi bagi mereka yang termasuk dalam jaringan yang dilakukan. Dalam bukunya, Putnam mengemukakan bahwa modal sosial berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan adalah prasyarat bagi perkembangan ekonomi dan merupakan syarat dasar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Putnam (1993:36) menyatakan bahwa:

*“First, the existence of social networks allows for coordination and communication that can foster mutual trust amongst fellow members of society. Second, trust has positive implications for*

*social life. This is demonstrated by the fact that the connection of people who have mutual trust in a social network strengthens the norms of the obligation to help each other. The three different successes achieved through cooperation in the past in this network will encourage continuity in the future.”*

Pertama, keberadaan jejaring sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat mendorong kepercayaan bersama di antara rekan-rekan masyarakat. Kedua, kepercayaan memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan kehidupan sosial. Ini ditunjukkan dengan fakta bahwa hubungan individu-individu yang memiliki rasa saling percaya dalam sebuah jejaring sosial yang memperkuat norma-norma kewajiban untuk dapat saling mendukung satu sama lain. Tiga kesuksesan yang berbeda yang dicapai melalui kolaborasi di masa lalu dalam jaringan ini akan mendorong kontinuitas di masa depan.

Berdasarkan penjelasan mengenai modal sosial menurut Putnam, dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan potensi yang dapat meningkatkan kesadaran bersama tentang akan banyaknya peluang yang dapat dimanfaatkan dan kesadaran bahwa nasib bersama akan terkait dan ditentukan oleh usaha bersama yang dilakukan. Terdapat keterkaitan yang saling melengkapi yang dapat dijadikan alat analisis untuk melihat *social capital* dalam masyarakat. Dengan memahami definisi *social capital* yang sudah dikemukakan di atas, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai *social capital* dalam hal jejaring sosial, norma, serta kepercayaan.

#### **2.1.1.2 Dimensi Modal Sosial**

Dimensi modal sosial memiliki definisi dan terminologi yang berbeda dengan modal sosial manusia (*human capital*) (Fukuyama, 1995). *Human Capital* merujuk

pada pengetahuan dan keterampilan individu yang dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan bentuk-bentuk pendidikan lainnya. Disisi lain, modal sosial adalah kemampuan atau keterampilan yang muncul dari adanya kepercayaan umum dalam masyarakat atau bagian-bagiannya. Modal sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial terkecil atau paling dasar hingga kelompok sosial yang paling besar.

Dimensi modal sosial berkembang dalam suatu masyarakat yang mengandung nilai, norma, dan pola interaksi sosial untuk mengatur kehidupan sehari-hari anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2000). Menurut Adler dan Kwon (2000) menjelaskan bahwa dimensi modal sosial menggambarkan keterkaitan internal dalam struktur kolektif yang memberikan keuntungan bersama dari proses dinamika sosial. Nilai-nilai acuan dan unsur-unsur yang membentuk modal sosial antara lain sikap partisipatif, sikap saling peduli, saling memberi dan menerima, saling percaya dan saling menguatkan melalui nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung. Elemen lain yang berperan penting adalah kemauan masyarakat untuk senantiasa proaktif, baik dalam menegakkan nilai-nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun menciptakan kreasi dan gagasan baru. Inilah bentuk modal sosial yang sesungguhnya yang dapat menopang kekuatan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Hasbullah (2006), inti dari modal sosial terletak pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama ini diwarnai oleh hubungan timbal balik dan saling menguntungkan yang dibangun di atas kepercayaan dan didukung oleh norma dan

nilai sosial yang positif dan kuat antara sesama individu. Kekuatan modal sosial akan maksimal apabila didukung oleh semangat proaktif dalam menjalinan hubungan berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, serta kepercayaan yang diperkuat oleh nilai dan norma yang mendukungnya.

### **2.1.1.3 Elemen Modal Sosial**

Melihat dari aspek sosiologis, maka elemen-elemen modal sosial terdiri dari 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:

#### **1. Kepercayaan (*Trust*)**

Kepercayaan adalah salah satu komponen utama dalam modal sosial yang mendasari terbentuknya rasa saling percaya di antara berbagai kelompok masyarakat, dan menjadi dasar munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial (*network*) yang terjalin dalam bentuk institusi (lembaga). Keberadaan kepercayaan dapat memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan dan dengan demikian mendorong terjadinya hubungan timbal balik. Kepercayaan merupakan elemen penting dari modal sosial yang dapat menjadi perekat hubungan jangka panjang dalam kelompok masyarakat. Dengan menjaga atau membangun kepercayaan, masyarakat dan para *stakeholder* dapat secara aktif bekerja sama.

Menurut pendapat Fukuyama (1995) kepercayaan adalah sikap saling percaya dalam masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk bersatu memberikan timbal balik dan dengan demikian akan meningkatkan modal sosial. Tindakan yang dilandasi rasa saling percaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi, terutama untuk kemajuan bersama. Kejujuran dalam

komunitas memperkuat solidaritas dan kemauan untuk bekerja sama. Dalam konteks kepercayaan, faktor-faktor seperti kekerabatan, jabatan, dan status sosial masih memainkan peran penting.

## **2. Jejaring (*Network*)**

Jejaring sosial tercipta melalui keterhubungan antara individu dan komunitas. Jejaring sosial muncul karena adanya hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Jejaring sosial yang kuat di antara anggota kelompok sangat penting untuk menjaga sinergi dan kohesi bersama. Menurut Putnam dan Lubis (2001), menyebut jaringan sosial sebagai salah satu elemen modal sosial yang kehadirannya terhadap di dalam hubungan sosial antar individu dalam modal sosial memberikan manfaat terkait pengelolaan sumber daya bersama, karena dapat memudahkan dalam koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan bersama. Selain itu, jejaring sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar individu dengan institusi dan dari jaringan antar institusi. Pada saat yang sama, jejaring sosial merupakan dimensi yang mungkin memerlukan dukungan dan dimensi lainnya karena kerja sama dan jaringan sosial tidak akan terwujud jika tidak dilandasi oleh norma dan rasa saling percaya.

Badaruddin (2005) menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam jaringan sosial yang menjadi unit sosial atau organisasi lokal, maka tercipta kemampuan secara kolektif mengalihkan kepentingan 'saya' menjadi 'kita', sehingga terbangun kekompakan dan solidaritas di antara masyarakat. Jaringan sosial meliputi: partisipasi, pertukaran timbal balik, kerja sama dan kesetaraan (Lubis, 2001).

### 3. Norma (*Norms*)

Norma adalah ketentuan yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma berisikan mengenai pandangan, nilai, harapan, dan tujuan yang diyakini dan dipartikkan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Norma dapat bersumber dari agama, pedoman moral, dan standar sekuler seperti kode etik profesi. Meskipun biasanya norma tidak tertulis, namun dipahami sebagai penentu pola perilaku yang baik dalam hubungan sosial, sehingga dikenakan sanksi sosial atas pelanggarannya.

Terdapat pola-pola hubungan dalam kehidupan manusia, antara lain :

- 1) Sesuatu yang menjadi dasar tujuan kehidupan sosial yang ideal berdasarkan pola-pola yang terbentuk dalam realitas sosial.
- 2) Sesuatu yang menjadi pola penentuan untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang didalamnya terdapat seperangkat perintah dan larangan beserta sanksinya yang disebut dengan sistem norma

Norma sosial menentukan kekuatan hubungan antar individu karena norma sosial mendorong kohesivitas sosial yang berpengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat, sehingga dianggap modal sosial. Menurut Coleman (1990), norma menentukan apa yang baik dan buruk, serta dapat diekspresikan dalam bentuk bahasa formal atau informal sebagai kebijakan yang harus dipahami dan diikuti oleh semua orang yang memegang norma tersebut. Norma hanya akan muncul jika ada komunikasi dan keberadaannya tergantung pada komunikasi yang teratur.

## 2.1.2 Tinjauan tentang *Collaborative Governance*

### 2.1.2.1 Konsep *Collaborative*

Menurut Ansell dan Gash dalam Hayat (2018), *Collaborative* adalah cara mengelola atau mengarahkan institusi dengan melibatkan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Hal ini menggambarkan cara pemerintah berinteraksi dengan mitranya. Proses kolaboratif mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan tujuan menghasilkan hasil yang inovatif atau prestasi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Tadjudin dalam Dorisman et al., (2021) mendefinisikan *collaborative* sebagai tindakan di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk mencapai kepuasan bersama berdasarkan prinsip "win-to-win". Lebih lanjut, Tadjudin menjelaskan bahwa dalam sektor publik, *collaborative* dapat diartikan sebagai konsep hubungan antar pemerintahan, aliansi strategis, dan *network* multi-organisasi yang membahas kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang sama, yang sulit dicapai dengan dilakukan secara individual.

Dalam sektor publik, *collaborative* dapat di sebagai proses kebersamaan, kerja sama, pembagian tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara berbagai entitas yang bekerja sama untuk menghasilkan barang dan layanan publik guna memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Entitas yang berkolaborasi dapat berasal dari pemerintah, masyarakat sipil, atau sektor swasta.

Namun, dalam konteks penelitian ini, *collaborative* dimaksudkan sebagai proses kerja sama antara berbagai lembaga dan pihak terlibat, serta pihak-pihak

yang mendapatkan manfaat dari program kolaborasi dan dampak dari program kolaborasi tersebut.

### **2.1.2.2 Konsep *Governance***

Salah satu konsep yang dikembangkan oleh para ilmuwan politik dan ahli administrasi adalah *governance*, yang mengubah pemerintahan menjadi suatu bentuk tata kelola. Secara empiris, pemerintahan diartikan dengan kekuasaan dan kewenangan mutlak terhadap masyarakat, namun *governance* merupakan perspektif baru yang memandang pemerintah bukan hanya sebagai institusi. Sebaliknya, *governance* adalah proses yang mencakup berbagai elemen di luar pemerintah itu sendiri dan bukan hanya sebuah institusi.

Dalam pandangan Abdullah, Rhodes (2016) konsep *governance* memiliki karakteristik bahwa *governance* merupakan jaringan organisasi yang di dalamnya terdapat permintaan pasar untuk saling bertukar sumber daya. Menurut *World Bank*, terdapat tiga lingkup dalam *governance*, yaitu negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat sipil (*civil society*) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing untuk mendukung tujuan yang sama.

### **2.1.2.3 Konsep *Collaborative Governance***

Ansell dan Grash (2007:544) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai suatu pengaturan yang melibatkan satu atau lebih lembaga public bekerja secara langsung dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berdasarkan pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk mengembangkan atau mengimplementasikan kebijakan public, serta mengelola program dan aset publik.

*Collaborative Governance* adalah implementasi dari konsep “*Multipartner governance*” yang mencakup sektor swasta, masyarakat dan komunitas sipil yang dibangun atas sinergi pemangku kepentingan serta perencanaan *hybrid* seperti kerjasama publik-swasta dan swasta-sosial (Agrawal dan Lemos dalam Balogh, S, et al., 211:3).

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya *collaborative governance* dalam mengatasi masalah publik, yaitu:

1. *Starting Condition* merupakan kondisi awal dimana *collaborative governance* diimplementasikan yang termasuk kolaborasi sebelumnya, potensi dan insentif yang diharapkan melalui *collaborative governance*.
2. *Facilitative Leadership* mengacu pada musyawarah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait untuk menetapkan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, dan berbagi manfaat bersama.
3. *Collaborative Process* terdiri dari 5 (lima) tahapan yaitu *face to face* dialog antar lembaga yang berpartisipasi untuk membangun kolaborasi yang efektif dan mencapai kesepakatan bersama, *trust building* antar lembaga yang berpartisipasi, *commitment to process* yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan kolaborasi dan harus dianut oleh setiap lembaga yang berpartisipasi, *share understanding* yaitu antara lembaga yang berpartisipasi untuk mengetahui dan menyelaraskan kesepahaman dalam hal kesamaan visi dan misi, kesamaan tujuan, kesamaan ideologi, kesamaan sasaran dan arah yang jelas dan strategis, serta hasil awal yang merupakan hasil awal dari proses

kolaborasi yang sedang berlangsung.

*Collaborative governance* memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi karakteristik yang memudahkan dalam menganalisis suatu fenomena apakah dapat disebut sebagai *collaborative governance* atau tidak, yaitu:

1. Orientasi konsensus yang menjelaskan tentang tujuan dari *collaborative governance* yang dijalankan.
2. Kepemimpinan kolektif yang menjelaskan tentang struktur dari entitas yang terlibat dalam *collaborative governance*.
3. Komunikasi multi arah yang menjelaskan interaksi antar aktor atau entitas yang terlibat dalam *collaborative governance*.
4. Pembagian sumber daya yang menjelaskan bagaimana proses *collaborative governance* berlangsung.

Menurut Emerson, et al (2011), pelaksanaan *collaborative governance* mengukur keberhasilan kolaborasi melalui 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

1. Struktur Jaringan (*Network Structure*)
2. Komitmen Terhadap Tujuan (*Commitment to a Common Purpose*)
3. Adanya Saling Percaya diantara *Stakeholders* (*Trust among the participants*)
4. Kejelasan Dalam Tata Kelola (*Governance*)
5. Akses Terhadap Otoritas (*Access to Authority*)
6. Pembagian Akuntabilitas dan Responsibilitas (*Distributive Accountability/Responsibility*)
7. Penyampaian Informasi (*Information Sharing*)
8. Akses Terhadap Sumberdaya (*Access to Resources*)

### **2.1.3 Tinjauan tentang Kesejahteraan Keluarga**

#### **2.1.3.1 Definisi Kesejahteraan**

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, untuk mendapatkan kehidupan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Dari undang-undang ini terlihat bahwa tingkat kesejahteraan diukur berdasarkan kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan material berkaitan dengan pendapatan yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual berhubungan dengan pendidikan, keamanan, dan ketentraman hidup. Kesejahteraan merupakan hal yang subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu memiliki pedoman sendiri yang berisikan tujuan dan cara hidup yang ingin diwujudkan.

#### **2.1.3.2 Definisi Keluarga**

Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama dan saling membutuhkan satu sama lain. Duval dan Logan dalam Zakaria (2017) mengatakan bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan melalui pernikahan, kelahiran, dan adopsi dengan tujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan pertumbuhan fisik, mental, emosional dan sosial setiap anggota keluarga. Keluarga adalah tempat dimana individu tumbuh, berkembang, dan belajar nilai-nilai yang nantinya dapat membentuk kepribadiannya. Proses pembelajaran ini berlangsung terus menerus selama individu tersebut hidup.

### **2.1.3.3 Definisi Kesejahteraan Keluarga**

Menurut Soetjipto (1992) kesejahteraan keluarga terciptanya situasi yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan fisik dan sosial bagi anggota keluarga tanpa menemui hambatan yang serius dalam keluarga, dan dalam mengatasi masalah keluarga akan mudah bagi anggota keluarga untuk mengatasinya secara bersama-sama sehingga dapat terwujud taraf hidup keluarga yang harmonis. Konsep tersebut mengandung makna bahwa kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga untuk membentuk keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari upaya-upaya yang dilakukan untuk kesejahteraan keluarga.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai suatu kondisi keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan serta kemampuan fisik-material yang untuk hidup mandiri dan berkembang diri sehingga dapat meningkatkan keharmonisan dalam keluarga dan kebahagiaan lahir dan batin.

Demikian kesejahteraan keluarga bersifat kondisional, maka perlu dilakukan ukuran-ukuran tertentu untuk menilainya seperti indikator-indikator yang harus dicapai oleh setiap keluarga. Sebuah keluarga yang dapat memenuhi indikator-indikator untuk mencapai tingkat keluarga sejahtera menurut Buku Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang ditetapkan oleh BKKBN, maka keluarga tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera (Prisma, 1994).

### 2.1.3.4 Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian individu melalui berbagai fungsi seperti kasih sayang, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan, perlindungan dan rekreasi. Proses pembelajaran dalam keluarga terjadi melalui sosialisasi dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mendidik dan membimbing anak sesuai dengan yang mereka percaya bahwa pola tersebut tepat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anaknya. Keberfungsian keluarga menunjukkan bagaimana sebuah keluarga berfungsi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencakup gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan dalam keluarga.

Terdapat 8 fungsi keluarga, sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Keagamaan

Keluarga adalah tempat pertama kali nilai-nilai agama diajarkan dan tempat menanamkan identitas agama kepada seluruh anak, serta pengembangan nilai-nilai agama dalam keluarga untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### 2. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai budaya luhur yang menjadi panutan dalam kehidupan bernegara yang dapat terus di dukung. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan, dan mempelajari adat-istiadat masyarakat.

#### 3. Fungsi Cinta Kasih dan Kasih Sayang

Cinta kasih dalam keluarga adalah faktor penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga harus menciptakan suasana yang penuh cinta kasih dalam kehidupan yang dilakukan. Fungsi kasih sayang dapat diwujudkan dalam bentuk kenyamanan dan perhatian antara keluarga.

#### 4. Fungsi Perlindungan

Keluarga sebagai tempat berlindung atau bernaung bagi anggota keluarga, sebagai tempat yang memberikan ketenangan dan kehangatan.

#### 5. Fungsi Reproduksi

Keluarga mengatur reproduksi keturunan secara sehat dan terencana mendidik anak-anak menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga juga sebagai tempat untuk memberikan pendidikan tentang isu-isu seksualitas dan pendidikan seks yang sehat.

#### 6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga adalah tempat pertama dan terpenting dimana anak dididik dalam perkembangan dan interaksinya sebagai proses pembelajaran sosialisasi dan komunikasi yang baik untuk kehidupan.

#### 7. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan tempat yang paling penting untuk mengatur keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan dalam keluarga.

#### 8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga berperan dalam menata dan memelihara kehidupan sekaligus menjaga lingkungan fisik dan sosial serta mengembangkan sikap ramah terhadap lingkungan untuk memberikan yang terbaik. Dalam hal ini, keluarga adalah tempat pertama

bagi individu untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan kepribadian mereka melalui interaksi sehari-hari yang penuh kasih dan pendidikan.

### **2.1.3.5 Indikator Kesejahteraan Keluarga**

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan bahwa terdapat indikator tingkat kesejahteraan kedalam 5 tahapan, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar untuk anak usia sekolah.

#### 2) Keluarga Sejahtera I

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), tetapi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan psikologis (*Psychological needs*) seperti kebutuhan ibadah, makanan protein hewani, pakaian, interaksi keluarga, kesehatan, penghasilan, dan kemampuan baca dan tulis latin.

#### 3) Keluarga Sejahtera II

Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*), dan kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*), namun belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengembangannya (*development needs*), seperti peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan akses informasi.

#### 4) Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), psikologis (*psychological needs*) dan pengembangannya, namun belum mampu memenuhi indikator aktualisasi diri (*self esteem*), seperti memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan secara teratur untuk kepentingan sosial dan berperan aktif dalam lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, dan pendidikan.

#### 5) Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhan dasar, psikologis dan pengembangan, serta memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

### **2.1.4 Tinjauan tentang Kampung Keluarga Berkualitas**

#### **2.1.4.1 Pengertian Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)**

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah sebagai unit wilayah setingkat desa yang berfokus pada integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga dalam segala dimensinya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Sebagai pendekatan Pembangunan universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengoptimalkan pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga, maka sangat penting untuk mendorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa atau kelurahan.

#### **2.1.4.2 Tujuan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)**

##### a. Tujuan Umum

Tujuan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan sektor terkait guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khususnya adalah meningkatkan peran pemerintah baik pusat maupun daerah, serta lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi serta membina masyarakat dalam menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait.

1. Menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pembangunan yang berwawasan kependudukan.
2. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern
3. Memperkuat ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
4. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS.
5. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
7. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.

#### **2.1.4.3 Dasar Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas**

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
3. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. SE Mendagri Nomor 843.4/2879/SJ/2020, tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
5. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

#### **2.1.4.4 Program Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)**

1. Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina keluarga balita merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya melalui kegiatan rangsangan mental, emosional, intelektual, moral, sosial dalam mendukung tumbuh kembang anak balita dengan berbagai media agar menjadi

manusia yang bertumbuh secara berkualitas. Tujuan Bina Keluarga Balita adalah mengoptimalkan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui kegiatan stimulasi atau rangsangan fisik, intelektual, mental emosional, sosial dan spiritual secara seimbang untuk dapat mendayagunakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

## 2. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja adalah tempat dalam melakukan bimbingan, pendampingan, dan pengetahuan kepada keluarga yang memiliki anak remaja berusia 10 hingga 24 tahun. Bina Keluarga Remaja berfungsi sebagai tempat komunikasi, interaksi, dan pertukaran pengalaman antara keluarga yang menghadapi permasalahan pada remaja, sehingga dapat memberikan solusi bersama. Dengan adanya kegiatan Bina Keluarga Remaja dapat membantu orang tua untuk memahami dan berkomunikasi dengan remaja atas permasalahan yang dialami. Bentuk kegiatan yang dilakukan Bina Keluarga Remaja adalah dengan melakukan pertemuan para orangtua yang mempunyai anak remaja. Kegiatan ini dilakukan sebulan sekali untuk memberikan edukasi, pelatihan, dan pengetahuan mengenai permasalahan remaja yang dialami dan cara mengatasi permasalahan tersebut.

## 3. Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan (poktan) untuk keluarga yang terdapat lanjut usia dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Pengetahuan ini meliputi pola perawatan,

dukungan, dan pemberdayaan lansia sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Sasaran Bina Keluarga Lansia (BKL) meliputi keluarga yang memiliki lansia atau seluruh anggota keluarganya adalah lansia (sasaran langsung) dan perorangan atau lembaga yang memiliki keterampilan dalam bidang psikologi, kesehatan, dan pendidikan (sasaran tidak langsung).

#### 4. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga pra sejahtera secara berkelompok dalam lingkungan masyarakat yang sederhana. UPPKS bertujuan sebagai wadah pembelajaran usaha rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khusus KPS dan KS 1 serta mewujudkan keluarga kecil yang Bahagia dan sejahtera.

#### 5. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah wadah kegiatan Program Generasi Berencana (GENRE) yang dikelola dari, oleh, untuk remaja. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) menyediakan layanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga, serta kegiatan penunjang lainnya bagi remaja, sebagai bagian dari program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja).

#### 6. Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu)

Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga merupakan kelompok kegiatan masyarakat yang berperan sebagai pusat informasi kependudukan pada tingkat mikro dan berperan dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi. Rumah

DataKu harus selalu menyediakan data dan informasi kependudukan yang selalu dimutakhirkan oleh pengurus dan kader yang terkait. Tujuan Rumah DataKu untuk terfasilitasinya kegiatan pengumpulan data dan updating data, tersedianya data yang valid dan terkini, ditemukan isu- isu prioritas berdasarkan hasil analisis data, dan diperolehnya rekomendasi berdasarkan hasil analisis data.

#### **2.1.4.5 Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)**

Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) membutuhkan perencanaan dan mekanisme yang tepat untuk memastikan bahwa pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di suatu wilayah dapat benar-benar bermanfaat untuk masyarakat pada wilayah tersebut. Hal-hal berikut ini yang harus diperhatikan dalam pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, yakni :

1. Prinsip-Prinsip Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas
2. Persyaratan dan Kriteria Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas

Persyaratan:

- a. Data dan informasi keluarga serta potensi desa harus tersedia sebagai dasar penyusunan rencana kerja di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
- b. Dukungan dan komitmen dari pemerintah desa dan pemerintah daerah sangat diperlukan
- c. Partisipasi aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan PPKBD, Sub-PPKBD serta para kader sangat penting.

Kriteria:

a. Sasaran Utama:

- 1) Status desa yang akan dikembangkan Kampung Keluarga Berkualitas berdasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang diprioritaskan untuk desa sangat tertinggal, desa tertinggal; desa berkembang.
- 2) Capaian program Bangga Kencana dan *stakeholder* lainnya yang ada di desa dengan status kurang baik sehingga akan dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas.
- 3) Tingkat kesejahteraan keluarga pada desa yang kurang baik akan dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas.

b. Wilayah prioritas

Wilayah yang diprioritaskan meliputi daerah kumuh, pesisir/nelayan, daerah aliran sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan miskin, terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

3. Pendataan Potensi Wilayah

Sebelum pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, dilakukan pendataan dan pemetaan potensi wilayah yang mencakup, sebagai berikut:

- a. Potensi sebagai pengelola (PPKBD, Sub-PPKBD, Paguyuban dan tokoh- tokoh masyarakat).
- b. Potensi kegiatan (Poktan Tribina, Poktan kegiatan sektor lainnya yang ada di kampung).
- c. Potensi pelayanan (Posyandu, Polindes, Bidan praktek).

d. Potensi komitmen pemerintah (pemerintah desa dan pemerintah daerah)

#### 4. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas

Dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau susunan pengurus yang disepakati bersama. Susunan kelompok kerja/pengurus Kampung Keluarga Berkualitas dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan, dan muatan lain yang diinginkan di masing-masing wilayah, namun tujuannya tetap mengacu pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat di seluruh dimensinya.

#### 5. Membangun Kesepakatan Bersama

Setelah kelompok kerja terbentuk, dilakukan musyawarah warga untuk menyepakati pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas yang melibatkan semua kepentingan di tingkat desa dan perwakilan setiap dusun/kampung/RT, serta dalam pertemuan yang dilakukan juga memastikan komitmen dan dukungan terhadap Kampung Keluarga Berkualitas.

#### 6. Pembentukan/Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas

Setelah warga RW atau Dusun menyepakati pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, Ketua dan Pengurus pokja Kampung Keluarga Berkualitas mengusulkan kepada kepala desa/lurah/camat untuk mencanangkan dan mengukuhkan terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas.

### **2.1.4.6 Indikator Keberhasilan Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas**

#### 1. Indikator *Input*

- a. Tingginya partisipasi dari seluruh elemen wilayah dalam kemajuan Kampung Keluarga Berkualitas.
- b. Bermacamnya kegiatan yang dilakukan dengan terpadu, baik dari program pemerintah maupun inovasi masyarakat.
- c. Besarnya sumber anggaran untuk Kampung Keluarga Berkualitas yang didapatkan dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah, dan donator yang tidak mengikat.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana.

## 2. Indikator *Output*

- a. Terlaksananya kegiatan pada masing-masing seksi.
- b. Partisipasi petugas pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan.
- c. Peran serta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.
- d. Melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga oleh setiap keluarga.
- e. Frekuensi dan kualitas kegiatan KIE/penyuluhan.
- f. Frekuensi pelayanan KB-KR.
- g. Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya .
- h. Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program Bangga Kencana maupun kegiatan sektor yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas).
- i. Frekuensi kegiatan Gerakan masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas.

## 3. Indikator *Outcome*

Keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas diukur dari pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga dengan menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga), antara lain:

- a. Meningkatnya pelaksanaan keagamaan dalam keluarga.
- b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, baik ilmu pengetahuan maupun profesionalisme (semakin banyak orang yang memiliki keterampilan untuk meningkatkan usaha).
- c. Tercapainya rata-rata dua anak dalam satu keluarga, keluarga yang sehat, dan anak-anak yang tumbuh serta berkembang dengan baik.
- d. Meningkatnya pendapatan per kapita keluarga dan penggunaannya untuk menunjang kepentingan kebutuhan keluarga.
- e. Terlindunginya masyarakat atau keluarga sehingga tercipta kehidupan yang tentram dan nyaman.
- f. Terjalinnnya hubungan harmonis antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat serta pada lingkungan.
- g. Berkembangnya budi pekerti, tata krama, dan seni budaya dalam keluarga dan masyarakat sekampung.
- h. Tertatanya lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perilaku dan lingkungan.

## **2.1.5 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial**

### **2.1.5.1 Pengertian tentang Pekerjaan Sosial**

Zastrow dalam Sukoco (2011:7) mengemukakan bahwa pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional dalam membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk

meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka dalam keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan dalam pencapaian tujuan mereka. Sementara itu, Siporin dalam Fahrudin (2018) menyatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan metode institusi sosial dalam membantu individu mencegah serta memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami, dengan cara memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (*National Association of Social Workers*) merumuskan pekerjaan sosial, sebagai berikut:

*“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes.”* (NASW, 2013)

Mengutip dari *National Association of Social Workers* dalam buku *Pekerjaan Sosial di Indonesia: Suatu Pengantar Umum*, 2022:177) pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka dalam keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari aplikasi profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial untuk satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut ini: membantu orang-orang memperoleh layanan yang nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok menyediakan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan

berpartisipasi dalam proses-proses legislatif yang relevan.

Indonesia memiliki dasar hukum mengenai konsep praktik pekerjaan sosial. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menyatakan bahwa “pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Berikut definisi Praktik pekerjaan sosial dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan sosial:

*“Penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.”*

Berdasarkan definisi pekerjaan sosial dari para ahli dan Undang-Undang tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang mendorong pemecahan masalah pada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial yang dilakukan.

#### **2.1.5.2 Tujuan Pekerjaan Sosial**

Tujuan pekerjaan sosial menurut *National Association of Social Workers* (NASW), sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam memecahkan permasalahan, mengatasi, dan perkembangan yang dialami.
2. Menghubungkan individu dengan sistem yang menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan untuk mereka lakukan.
3. Memperbaiki efektivitas dan operasional sistem yang menyediakan sumber

daya dan layanan untuk individu.

4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

### **2.1.5.3 Praktik Pekerjaan Sosial berbasis Keluarga**

Pekerja sosial seperti yang dijelaskan oleh Rubin dan Rubin, dalam menginisiasi munculnya modal sosial dilakukan melalui aplikasi teknik pengembangan dan pengorganisasian masyarakat (*Community Organization/Community Development*). Teknik-teknik pekerja sosial makro mencakup definisi komunitas atau populasi sasaran, identifikasi dan analisis sumber daya serta masalah komunitas, memfasilitasi dalam melakukan penetapan tujuan dan sasaran, pemilihan strategi yang efektif untuk aksi komunitas, melakukan implementasi program dan proyek, serta melakukan evaluasi hasil (Rubin dan Rubin, 1992). Dalam pengorganisasian sosial, pekerja sosial bekerja dengan pemimpin lokal, kelompok sipil, kelompok usaha lokal, organisasi pemuda, dan pihak-pihak lainnya untuk membentuk dan memperkuat asosiasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat jaringan sosial, membantu masyarakat dalam mengembangkan rasa identitas, mendorong kolaborasi yang efektif, dan menangani masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam melakukan pekerja sosial komunitas yang bekerja bersama dengan kelompok dalam masyarakat, menyatukan anggota komunitas berbeda di sekitar kepentingan bersama sehingga memperkuat jaringan dan pembentukan modal sosial. Dengan membangun koalisi antara orang dan organisasi dengan kepentingan yang berbeda, maka mereka menciptakan hubungan sosial baru, dan asosiasi sosial baru, serta memperkuat partisipasi dalam komunitas.

Pekerja sosial juga sering dalam membantu mengembalikan hak individu, keluarga, atau kelompok tidak dapat terpenuhi dalam kehidupan sipil dengan menciptakan asosiasi yang menghargai pandangan berbeda dan mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Pekerjaan sosial melakukan penguatan asosiasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, memfasilitasi perluasan jaringan, serta mengerahkan modal sosial menjadi aset untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai peran, antara lain sebagai berikut:

1. Enabler

Pekerja sosial dalam peran enabler melibatkan individu, keluarga, dan kelompok kecil dalam proses konseling. Enabler mendorong tindakan dengan terlibat dalam hubungan membantu, membingkai solusi, dan bekerja untuk perubahan yang konstruktif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, enabler adalah agen perubahan yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menyediakan kondisi yang diperlukan bagi klien untuk mencapai tujuan mereka, menghadapi tantangan hidup, terlibat dalam proses perkembangan kehidupan alami mereka, dan melaksanakan tugas mereka (Maluccio, 1981: 19). Dalam konteks bekerja dengan kelompok, pekerja sosial memungkinkan interaksi yang mendukung antar anggota kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah. Sebagai pendukung, praktisi berkonsultasi dengan sistem klien individu dan keluarga untuk meningkatkan fungsi sosial dengan memodifikasi perilaku, pola hubungan, dan lingkungan sosial dan fisik.

## 2. Fasilitator

Fasilitator berperan dalam mengaktifkan partisipasi anggota organisasi dalam upaya perubahan. Dengan melakukan fasilitasi proses pada kelompok, pekerja sosial mendorong fungsi kelompok yang kompeten, merangsang dukungan dalam kelompok, mengamati interaksi kelompok, menawarkan umpan balik yang konstruktif, dan berbagi informasi tentang dinamika kelompok. Sebagai fasilitator, pekerja sosial memperkuat keterkaitan di dalam organisasi dan membantu mengatasi sikap apatis dan disorganisasi. Dalam peran ini, praktisi bahkan dapat fokus pada pengaturan lembaga mereka sendiri untuk meningkatkan kerjasama staf dan memastikan efektivitas penyampaian layanan sosial.

## 3. Broker

Menurut Thompson dan Thompson (2008), pekerjaan sosial sebagai broker atau advokat muncul sebagai hasil dari perubahan yang dibawa oleh Undang-undang NHS dan Komunitas 1990, khususnya perpecahan pembeli/penyedia. Mereka menyatakan:

*“Salah satu hasil dari perubahan ini adalah terciptanya tanggung jawab tambahan bagi banyak pekerja sosial, yaitu perantara. Pengorganisasian paket perawatan individual sebagai respons terhadap kebutuhan yang kompleks dan unik membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai perantara ... . Pekerja sosial mendapati diri mereka harus berurusan dengan kewajiban yang bersaing: di satu sisi, bertindak sebagai advokat atas nama orang-orang yang kurang beruntung yang menemukan diri mereka dalam keadaan rentan, tetapi juga, di sisi lain, sebagai penjaga gerbang sumber daya yang terbatas ...”* (Thompson dan Thompson, 2008, hlm. 166 dalam Scourfield, 2008).

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thompson pekerja sosial dapat berperan sebagai broker/advokat dalam memberikan referensi untuk mengakses sumber daya

maupun layanan yang akan membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, maupun masyarakat yang mampu dalam memperoleh kehidupan lebih baik. Pekerja sosial sebagai broker berperan dalam membantu anggota masyarakat mengakses sumber daya eksternal dalam meningkatkan kualitas hidup.